

PRO DAN KONTRA LEGALISASI PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA

Ardianto Wijaya Komala, Budiman Satria Ongkowidjaja,
Jonathan Johan Putera

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Ardianto Wijaya Komala

Abstract.

The phenomenon of LGBT and the debate surrounding same-sex marriage legalization in Indonesia have become controversial issues, provoking both support and opposition from various segments of society. This study discusses the shifting social perspectives on LGBT within the influence of global culture while considering the persistence of traditional and religious values in Indonesia. Proponents of legalization emphasize the importance of respecting human rights and promoting social equality, while opponents argue that such steps could disrupt the social and cultural order of the nation. This research analyzes the LGBT phenomenon in Indonesia within the context of Pancasila values and evaluates the emerging arguments for and against legalization. The results indicate that inclusive dialogue and prudent policy approaches are needed to create a society that respects civil rights without compromising social harmony. Through in-depth analysis, this study aims to provide guidance for policymakers in responding to this complex social phenomenon in a fair and sustainable manner.

Keywords: LGBT, Same-Sex Marriage, Legalization, Pancasila, Human Rights, Social Harmony, Indonesia.

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah negara dengan warisan budaya Timur yang mendalam, Indonesia memegang teguh pandangan serta nilai-nilai tradisional yang masih berakar kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks ini, budaya Timur secara umum tidak mengakui perilaku dan praktik yang bertentangan dengan norma-norma tradisional, termasuk yang berkaitan dengan budaya LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). Praktik seperti sodomi dan perkawinan sesama jenis sering kali dipandang sebagai tabu dan ditolak oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Meskipun budaya dan norma sosial di Indonesia cenderung menolak keberadaan kelompok LGBT, fenomena ini tetap nyata dan dapat ditemukan dalam masyarakat. Walaupun sering mengalami stigma dan penolakan sosial, individu dan kelompok LGBT terus berusaha menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Saat ini, belum ada regulasi hukum yang tegas atau jelas yang mengatur

status keberadaan mereka, yang menciptakan dilema baik di tingkat hukum maupun sosial. Dengan demikian, Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa, meskipun keberadaan kelompok LGBT tidak diakui secara resmi, mereka tetap ada dan mengalami perkembangan yang signifikan dalam konteks sosial yang kompleks ini.

Pada saat ini, fenomena LGBT menjadi isu yang sering diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia dengan beredarnya promosi, iklan, atau hanya sekadar sudut pandang perorangan mengenai LGBT di media sosial. Maraknya fenomena LGBT di Indonesia dapat dipahami sebagai pengaruh dari tren yang berkembang di negara-negara liberal, di mana komunitas LGBT mendapatkan pengakuan dan ruang yang lebih dalam masyarakat. Banyak individu melihat LGBT sebagai bagian dari gaya hidup modern yang menganggap pandangan heteroseksual sebagai sesuatu yang konservatif dan tidak relevan bagi semua orang. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami identitas seksual, di mana keberagaman orientasi seksual semakin diterima sebagai bagian integral dari dinamika sosial kontemporer. Perubahan ini menciptakan tantangan dan peluang baru dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, yang cenderung mempertahankan norma-norma tradisional.

Di beberapa negara lain, khususnya di negara-negara tetangga Asia seperti Thailand, perkawinan sesama jenis telah diakui atau dilegalkan. Ini memberikan tantangan tambahan bagi Indonesia, terutama dalam hal bagaimana negara ini merespons fenomena global ini. Di satu sisi, ada tekanan dari masyarakat internasional untuk menghormati hak asasi manusia dan memberikan perlakuan setara bagi semua individu, termasuk kelompok LGBT. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penerimaan perkawinan sesama jenis dapat bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal yang telah lama dijunjung tinggi.

Di satu sisi, para pendukung legalisasi hak-hak LGBT berargumen bahwa setiap individu, tanpa memandang orientasi seksual, berhak mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk hak untuk menikah dan mendapatkan pengakuan hukum. Mereka menekankan bahwa legalisasi ini tidak hanya akan mengurangi diskriminasi yang dialami oleh pasangan sesama jenis, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi mereka. Dengan adanya pengakuan hukum, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan adil, yang menghormati hak asasi manusia serta mendorong kesetaraan sosial di dalam masyarakat.

Namun, di sisi lain, para penentang legalisasi perkawinan sesama jenis berpendapat bahwa langkah ini berpotensi merusak nilai-nilai tradisional dan religius yang telah lama dipegang

oleh masyarakat Indonesia. Mereka mengkhawatirkan bahwa legalisasi tersebut dapat mengubah struktur sosial dan moral di Indonesia, yang mayoritas

penduduknya masih menganut nilai-nilai konservatif. Kekhawatiran ini mencerminkan ketakutan akan dampak jangka panjang terhadap integritas budaya dan norma-norma yang selama ini menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, serta potensi disrupsi terhadap kohesi sosial yang telah terjalin.

Meskipun tidak semua masyarakat menolak, sikap “diskriminasi” yang dirasakan oleh kaum LGBT dianggap sebagai pelanggaran HAM. Karena kaum LGBT hidup hampir di setiap bagian belahan dunia, mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, etnis, dan agama tertentu. Mereka juga adalah manusia yang harus dihormati haknya, akan tetapi di beberapa negara (termasuk Indonesia) mereka mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh identitas dan orientasi seksual.

Fenomena LGBT di Indonesia saat ini menjadi perbincangan yang memicu berbagai pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai kesesuaian fenomena LGBT dengan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila, di mana masing-masing sila memiliki hakikat yang unik namun saling berkorelasi satu sama lain. Setiap sila mencerminkan nilai-nilai yang menggambarkan sifat dan karakter bangsa Indonesia. Dalam rangka menanggapi fenomena LGBT yang berkembang di Indonesia, penelitian ini akan menganalisis fenomena tersebut dalam konteks nilai-nilai Pancasila untuk memahami implikasinya terhadap masyarakat.

Dengan memahami berbagai perspektif pro dan kontra yang ada, sangat penting bagi pembuat kebijakan dan masyarakat Indonesia untuk secara cermat mempertimbangkan langkah-langkah yang akan diambil, serta mengevaluasi dampak jangka panjang yang mungkin timbul dari keputusan terkait legalisasi perkawinan sesama jenis. Pendekatan yang bijaksana dan inklusif diperlukan agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya mencerminkan aspirasi keadilan sosial, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan tradisional yang ada. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sebuah solusi yang harmonis dan berkelanjutan dalam merespons fenomena ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi fenomena LGBT dan legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena isu yang diangkat bersifat sosial, budaya, dan hukum, yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks serta dinamika yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pro-Kontra Legalisasi Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Legalitas perkawinan sesama jenis merupakan isu yang sangat kontroversial dan memicu perdebatan yang mendalam baik di tingkat nasional maupun internasional. Topik ini telah mengundang perdebatan sengit antara kelompok konservatif yang menentang keras legalisasi tersebut, dengan kelompok progresif yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan bagi semua individu, termasuk komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Di berbagai negara, legalisasi perkawinan sesama jenis telah membawa perubahan sosial dan hukum yang signifikan, tetapi juga sering kali memicu resistensi dari kelompok yang berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional dan agama.

Di Indonesia, yang merupakan negara dengan keragaman budaya dan agama yang sangat kuat, diskusi mengenai isu ini tidak terhindarkan. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan nilai-nilai sosial yang konservatif, umumnya memiliki pandangan yang menolak keberadaan perkawinan sesama jenis. Penolakan ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita." Definisi ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menekankan norma heteroseksual sebagai standar dalam institusi perkawinan.

Namun, dengan meningkatnya kesadaran global akan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, wacana mengenai hak-hak LGBT mulai mendapatkan perhatian di Indonesia. Meskipun kelompok progresif yang mendukung kesetaraan hak masih minoritas, pandangan mereka mulai muncul ke permukaan sebagai bagian dari perjuangan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, isu legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia harus dilihat melalui perspektif yang lebih luas, melibatkan faktor-faktor hukum, sosial, agama, dan hak asasi manusia.

Argumen Pihak yang Mendukung Legalisasi Perkawinan Sesama Jenis

Pendukung legalisasi perkawinan sesama jenis umumnya menekankan pentingnya prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa setiap individu, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender, memiliki hak yang sama untuk mencintai, menikah, dan membangun keluarga. Berikut beberapa argumen yang mendasari dukungan ini:

a. Hak Asasi Manusia dan Prinsip Kesetaraan

Pendukung legalisasi perkawinan sesama jenis merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Menurut mereka, pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis merupakan perwujudan dari

prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan hak yang seharusnya dilindungi oleh negara.

b. Pengakuan Identitas dan Dignitas Individu

Bagi komunitas LGBT, pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis bukan hanya sekadar status hukum, tetapi juga merupakan pengakuan terhadap identitas pribadi mereka. Negara yang tidak mengakui hak ini dianggap mengabaikan keberadaan dan martabat mereka.

c. Manfaat Sosial dan Ekonomi

Pengakuan perkawinan sesama jenis juga dapat berdampak positif bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan legalisasi, pasangan sesama jenis akan memiliki akses yang lebih baik terhadap hak waris, asuransi kesehatan, serta perlindungan hukum lainnya, yang pada akhirnya akan mengurangi diskriminasi serta memperbaiki kesejahteraan sosial mereka.

d. Meningkatkan Penerimaan Sosial

Legalisasi perkawinan sesama jenis di negara-negara lain telah terbukti mengurangi diskriminasi terhadap komunitas LGBT dan membuka ruang diskusi yang lebih konstruktif mengenai hak-hak mereka. Pendukung legalisasi berharap bahwa Indonesia dapat mengalami perubahan serupa jika perkawinan sesama jenis diakui secara resmi.

Argumen Pihak yang Menentang Legalisasi Perkawinan Sesama Jenis

Sementara itu, penolakan terhadap legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia lebih sering didorong oleh alasan-alasan agama, budaya, serta kekhawatiran terhadap implikasi sosialnya. Berikut adalah beberapa argumen utama dari pihak yang menentang:

a. Bertentangan dengan Nilai Agama

Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama yang mengajarkan bahwa perkawinan adalah institusi yang sakral antara pria dan wanita. Baik Islam, Kristen, Katolik, maupun agama lainnya di Indonesia secara tegas menentang hubungan sesama jenis, sehingga legalisasi perkawinan sesama jenis dianggap melanggar ajaran agama dan merusak tatanan moral yang telah lama dipegang teguh.

b. Norma Sosial dan Budaya yang Konservatif

Masyarakat Indonesia memiliki norma sosial yang kuat terkait peran gender dan struktur keluarga. Pernikahan sesama jenis dianggap sebagai ancaman terhadap struktur keluarga tradisional yang berpusat pada hubungan heteroseksual. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa pengakuan terhadap perkawinan sesama jenis akan merusak nilai-nilai sosial yang telah mengakar dalam budaya Indonesia.

c. Dampak Terhadap Generasi Muda

Banyak yang khawatir bahwa legalisasi perkawinan sesama jenis akan memberikan dampak negatif terhadap generasi muda, termasuk kebingungan identitas dan orientasi seksual. Penentang sering menyuarakan bahwa pernikahan sesama jenis bisa dianggap sebagai normalisasi perilaku yang "menyimpang," yang pada akhirnya dapat merusak tatanan sosial yang ada di dalam strata masyarakat Indonesia.

d. Kendala Hukum dan Perubahan Konstitusi

Konstitusi dan berbagai peraturan di Indonesia secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita. Mengubah definisi ini memerlukan amandemen undang-undang yang tidak hanya melibatkan perubahan normatif tetapi juga potensi resistensi dari berbagai kelompok politik dan sosial.

Implikasi dan Tantangan Legalisasi Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia

Jika legalisasi perkawinan sesama jenis diajukan sebagai kebijakan, perubahan ini akan membawa dampak luas bagi sistem hukum, sosial, dan politik di Indonesia. Secara hukum, perubahan ini menuntut amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya, termasuk hak waris, adopsi anak, serta hak-hak sosial lainnya. Hal ini akan memicu diskusi serius mengenai perlindungan hak-hak sipil dan kesetaraan di tengah masyarakat yang masih sangat heteronormatif.

Prof. Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum. secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia. Sikap ini didasarkan pada beberapa argumen utama yang berkaitan dengan absennya regulasi yang mendukung legalisasi tersebut serta potensi dampaknya terhadap tatanan sosial dan budaya di Indonesia. Menurut beliau, sistem hukum Indonesia, baik dari segi undang-undang maupun kebijakan, belum menyediakan landasan hukum yang cukup untuk mengakui dan melegalkan pernikahan sesama jenis. Hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, di mana perkawinan didefinisikan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita". Pasal ini secara eksplisit mengecualikan pasangan sesama jenis dari pengakuan hukum.

Menurut Prof. Tundjung, meskipun wacana hak asasi manusia dan kesetaraan gender semakin berkembang, hal ini tidak serta-merta menjadi dasar yang cukup untuk melakukan perubahan radikal pada undang-undang perkawinan di Indonesia. Pandangan ini sejalan dengan konsep hukum positivisme yang menekankan bahwa keabsahan hukum harus didasarkan pada peraturan formal yang telah diakui oleh negara. Dengan kata lain, selama tidak ada perubahan pada undang-undang yang berlaku, maka perkawinan sesama

jenis tetap tidak memiliki landasan hukum di Indonesia, dan setiap upaya untuk melegalkannya akan dianggap inkonstitusional.

Namun, Prof. Tundjung juga menyoroti pentingnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar komunitas LGBT sebagai warga negara Indonesia. Meskipun legalisasi perkawinan sesama jenis tidak dapat diterima dari segi hukum positif saat ini, komunitas LGBT tetap memiliki hak-hak pribadi yang harus dihormati dan dilindungi, seperti hak atas privasi, hak untuk bebas dari kekerasan, serta hak untuk tidak didiskriminasi. Dalam konteks ini, Prof. Tundjung mendukung prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa "semua orang dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama". Oleh karena itu, meskipun menolak legalisasi perkawinan sesama jenis, beliau menekankan bahwa komunitas LGBT tidak boleh kehilangan hak-hak dasar mereka sebagai individu yang setara di mata hukum.

Dari sisi sosial, resistensi dari kelompok-kelompok konservatif dapat memicu ketegangan dan bahkan konflik sosial. Di sisi lain, kegagalan untuk mengakui hak-hak komunitas LGBT akan memperburuk diskriminasi serta ketidakadilan yang mereka alami, yang dapat berujung pada penurunan kesejahteraan emosional dan psikologis mereka. Untuk itu, penting bagi para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan segala implikasi dan mencari jalan tengah yang mampu menghormati hak-hak sipil tanpa mengabaikan aspirasi moral dan agama yang dominan di masyarakat.

Wawancara dengan salah satu komunitas LGBT

Tommy dan Martin adalah dua individu yang memiliki kisah unik mengenai proses penemuan jati diri mereka di tengah masyarakat yang kurang terbuka terhadap komunitas LGBT. Masing-masing

dari mereka memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda dalam menghadapi tantangan serta perjuangan untuk dapat diterima dan hidup sesuai dengan identitas mereka.

Tommy: Proses Penemuan Diri di Usia Muda

Tommy pertama kali menyadari perbedaan dalam orientasi seksualnya saat masih duduk di bangku SMP. Hal ini dimulai ketika seorang tetangganya yang lebih tua mengajaknya bermain PlayStation dengan cara yang tidak biasa, memicu perasaan dan dorongan seksual yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan. Sejak saat itu, Tommy mulai merasa tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang identitas dirinya. Dukungan dari teman-temannya serta akses ke informasi dari media sosial dan forum-forum online juga mempercepat proses pemahaman dirinya mengenai orientasi seksual yang berbeda.

Tommy lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen yang cukup taat, tetapi dia memiliki pandangan yang terbuka terhadap isu-isu LGBT. Menurutny, agama tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menerima perbedaan. Asalkan tidak ada tindakan yang merugikan atau berdampak negatif pada orang lain, setiap orang berhak untuk hidup sesuai dengan jati diri mereka. Sikap ini membuat Tommy mampu berdamai dengan identitasnya tanpa merasa tertekan oleh ajaran agama yang dianutnya.

Sebagai pribadi yang ekstrovert, Tommy mudah beradaptasi dan membangun hubungan sosial. Namun, ini bukan berarti dia bebas dari tantangan. Keluarga dan beberapa lingkungan sosial di sekitarnya masih menganggap orientasi seksualnya sebagai sesuatu yang tabu dan tidak dapat diterima. Meski begitu, Tommy merasakan perubahan dalam sikap masyarakat di beberapa tempat, terutama di Bali, yang lebih inklusif dan terbuka terhadap komunitas LGBT. Dukungan dari teman-teman terdekatnya menjadi salah satu faktor yang membantu Tommy menjaga keseimbangan mentalnya, membuatnya merasa lebih diterima dan dipahami.

Tantangan dalam Masyarakat dan Strategi Menghadapinya

Tantangan terbesar bagi Tommy adalah stigma dan stereotip yang masih melekat pada komunitas LGBT di Indonesia. Pandangan negatif yang berkembang di masyarakat membuat banyak orang menilai komunitas ini sebelah mata dan menganggap mereka sebagai penyimpangan dari norma. Namun, Tommy memilih untuk menonjolkan sisi positif dan menunjukkan bakat serta kreativitasnya agar orang-orang melihat dirinya dari kualitas dan kontribusinya, bukan hanya dari orientasi seksualnya.

Di tempat kerja, Tommy merasa lebih bahagia karena telah menemukan lingkungan yang dapat menerima identitasnya tanpa prasangka. Ini membuatnya bebas mengekspresikan dirinya dan merasa lebih dihargai. Baginya, dukungan dari rekan kerja dan teman-teman merupakan fondasi penting yang memberinya kekuatan untuk tetap bersikap positif.

Pandangan terhadap Pendidikan LGBT di Sekolah

Tommy percaya bahwa edukasi mengenai LGBT penting untuk diterapkan di sekolah, tetapi harus dengan pendekatan yang tepat. Baginya, pendidikan semacam ini sebaiknya dimulai di jenjang SMA, ketika para siswa sudah lebih matang untuk memahami konsep yang kompleks seperti orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini penting agar informasi yang diberikan tidak menjadi bumerang bagi siswa itu sendiri. Dengan pemahaman yang lebih baik sejak usia remaja, Tommy berharap generasi muda bisa tumbuh menjadi individu yang lebih sadar dan menghargai perbedaan.

Pesan Tommy untuk Masyarakat

Tommy memiliki pesan sederhana namun bermakna: setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk belajar menghargai dan menghormati orang lain. Baginya, saling menghormati perbedaan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana setiap orang dapat menjalani hidup sesuai dengan jati diri mereka tanpa perlu merasa takut atau tertekan.

Martin: Menemukan Diri di Tengah Tekanan Agama dan Sosial

Martin, di sisi lain, mulai menyadari orientasi seksualnya ketika duduk di kelas 2 SMA. Sebelumnya, dia pernah mencoba menjalin hubungan dengan seorang perempuan saat SMP, tetapi tidak merasa nyaman. Tidak ada ketertarikan emosional atau fisik, dan hal ini membuat Martin semakin yakin bahwa orientasi seksualnya berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Sebagai seorang Muslim, Martin menghadapi tantangan besar dari segi agama. Ia paham bahwa orientasinya bisa dianggap sebagai hal yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Meskipun begitu, dia memilih untuk tetap menjalankan keyakinannya sambil menyembunyikan identitas seksualnya dari keluarga. Hingga kini, orang tua Martin tidak mengetahui kebenaran tentang orientasinya karena dia khawatir akan mendapatkan penolakan atau tekanan untuk berubah.

Namun, Martin merasa beruntung memiliki dukungan yang kuat dari teman-temannya. Ini memberinya kepercayaan diri untuk lebih terbuka tentang identitasnya di lingkungan sosial terdekat. Dukungan sosial ini sangat penting bagi kesejahteraan mental dan emosionalnya, terutama ketika dia harus menyembunyikan identitasnya di lingkungan kerja dan keluarga.

Pandangan tentang Perubahan Orientasi Seksual

Martin memiliki pandangan yang fleksibel tentang perubahan orientasi seksual. Menurutnya, perubahan mungkin saja terjadi, tetapi tidak bisa dipaksakan dari luar. Banyak orang, terutama dari keluarga dan lingkungan keagamaannya, berharap agar Martin "kembali ke jalan yang benar". Namun, Martin merasa bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika datang dari dirinya sendiri, bukan karena tekanan eksternal.

1.7. Menghadapi Diskriminasi dengan Sikap Positif

Martin pernah mengalami diskriminasi dan disebut dengan kata-kata yang merendahkan. Meskipun hal ini menyakitkan, dia memilih untuk tetap bersikap positif dan tidak terlalu memikirkan penilaian negatif dari orang lain. Baginya, yang lebih penting adalah kemampuan untuk menerima dirinya sendiri. Martin percaya bahwa orang lain bisa menilai apa pun yang mereka mau, tetapi dia tidak akan memaksakan siapa pun untuk menerima dirinya.

Martin berharap agar masyarakat Indonesia bisa lebih terbuka dan menerima keberagaman. Menurutnya, pendidikan tentang orientasi seksual dan identitas gender masih kurang di Indonesia. Ini menyebabkan banyak orang salah paham tentang isu-isu LGBT dan cenderung menghakimi tanpa pemahaman yang memadai. Oleh karena itu, Martin berharap suatu hari nanti, masyarakat bisa lebih inklusif dan memahami perbedaan dengan lebih baik.

Pesan Martin untuk Masyarakat

Pesan Martin adalah agar masyarakat saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Bagi Martin, sikap saling menghormati berarti memberi ruang bagi setiap individu untuk menjalani hidup sesuai dengan jati dirinya tanpa rasa takut dihakimi atau dipaksa berubah. Dengan sikap ini, masyarakat bisa menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang, terlepas dari identitas dan orientasi seksual mereka.

Tommy dan Martin mewakili potret nyata dari perjuangan komunitas LGBT di Indonesia, di mana mereka harus menghadapi tantangan yang kompleks dari segi budaya, sosial, hukum, dan agama. Meskipun mereka memiliki latar belakang agama yang berbeda, pengalaman yang mereka alami menunjukkan pola yang serupa: ketidakpastian, rasa takut, hingga keberanian untuk menerima diri sendiri di tengah tekanan eksternal yang menginginkan mereka untuk "berubah."

Tommy, dengan kepribadiannya yang ekstrovert, memilih untuk menghadapi tantangan dengan cara yang lebih terbuka. Ia mencari ruang yang menerima dirinya dan menonjolkan sisi-sisi positif agar masyarakat dapat melihat bahwa orientasi seksual bukanlah halangan bagi seseorang untuk berkontribusi pada masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan pemikirannya bahwa perubahan harus datang dari dalam komunitas itu sendiri, dengan menunjukkan kelebihan yang dimiliki dan membangun reputasi yang positif.

Di sisi lain, Martin, dengan pendekatan yang lebih introspektif, menerima bahwa orientasi seksualnya mungkin bertentangan dengan norma agama yang dianut oleh keluarganya. Ia merasa bahwa dirinya tidak dapat mengubah orientasi tersebut, kecuali jika perubahan itu datang dari dorongan pribadi, bukan karena tekanan sosial. Martin berusaha untuk menjaga keseimbangan antara identitas pribadinya dan keimanannya, sebuah dilema yang umum dihadapi oleh banyak individu LGBT di masyarakat konservatif. Sikap fleksibelnya terhadap perubahan menunjukkan kebijaksanaan dan kedewasaan dalam memahami dirinya, meskipun ia tetap harus bersembunyi di sebagian besar aspek kehidupannya.

Salah satu poin penting yang bisa diambil dari pengalaman Tommy dan Martin adalah betapa vitalnya dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Baik dukungan dari teman-teman, rekan kerja, maupun komunitas yang lebih luas

memberikan fondasi emosional yang kuat bagi individu LGBT untuk tetap tegar dan merasa diterima. Di Indonesia, di mana kebijakan hukum dan sosial masih belum ramah terhadap komunitas LGBT, peran lingkungan sosial yang mendukung menjadi krusial dalam menjaga kesejahteraan mental dan emosional mereka.

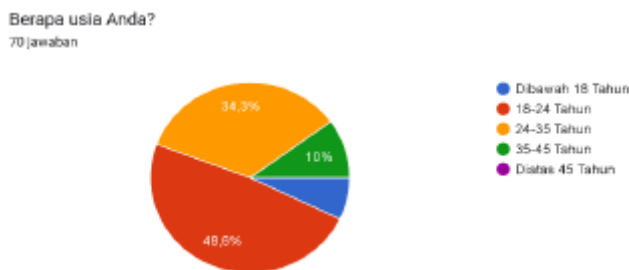
Di samping itu, kisah Tommy dan Martin menggarisbawahi perlunya adanya reformasi dalam pendekatan pendidikan mengenai orientasi seksual dan identitas gender di Indonesia. Pendidikan yang tepat, menurut Tommy, harus disesuaikan dengan usia siswa agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan menjadi bumerang. Martin, yang merasa bahwa kurangnya edukasi menciptakan kebingungan dan ketakutan yang tidak perlu, mengusulkan adanya pendekatan yang lebih sistematis dan inklusif di lingkungan sekolah.

- a. Responden berasal dari berbagai latar belakang agama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu.
- b. Sebagian besar responden berusia 18-24 tahun, dengan sebagian lainnya berada dalam kategori usia 24-35 tahun dan beberapa di bawah 18 tahun.
- c. Responden terdiri dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SMP, SMA, hingga S1.

Pesan terakhir yang ingin disampaikan dari kedua tokoh ini adalah bahwa penerimaan terhadap identitas seseorang tidak memerlukan dukungan mutlak terhadap pilihan hidup mereka, tetapi setidaknya membutuhkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Sikap menghargai ini tidak hanya akan memberikan rasa aman bagi komunitas LGBT, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang, orientasi seksual, atau identitas gendernya, dapat hidup dengan damai dan berkontribusi secara penuh.

Hasil Survey

Hasil dari sebuah survei atau kuesioner yang dilakukan terhadap beberapa responden mengenai pandangan mereka terhadap LGBT dan legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia. Survei mencakup beberapa kategori, seperti agama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan berbagai pertanyaan terkait pengetahuan, sikap, serta pandangan mereka tentang komunitas LGBT.



Gambar 1. Hasil survey tentang latar belakang responden

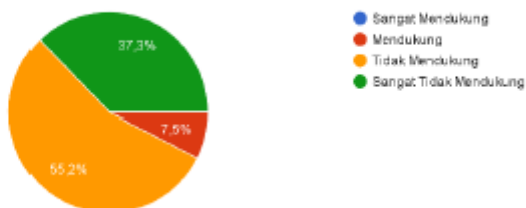
- a. Sebagian besar responden tidak setuju jika pendidikan tentang LGBT dimasukkan dalam kurikulum sekolah, terutama di tingkat SMP.
- b. Alasan utama penolakan terkait dengan kekhawatiran bahwa pendidikan tersebut dapat memengaruhi perkembangan identitas seksual siswa.
- a. Hanya segelintir responden yang mendukung legalisasi perkawinan sesama jenis, dengan alasan bahwa setiap individu berhak memilih pasangan hidupnya.
- b. Responden yang menolak menyatakan bahwa legalisasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial yang mereka anut.

Persepsi terhadap Legalitas dan Perlindungan Hak LGBT:

- a. Hanya segelintir responden yang mendukung legalisasi perkawinan sesama jenis, dengan alasan bahwa setiap individu berhak memilih pasangan hidupnya.
- b. Responden yang menolak menyatakan bahwa legalisasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan sosial yang mereka anut.
- a. Mayoritas responden percaya bahwa masyarakat secara umum masih tidak mendukung komunitas LGBT dan sering kali memiliki sikap diskriminatif terhadap mereka.

Persepsi terhadap Legalitas dan Perlindungan Hak LGBT:

Seberapa percaya Anda bahwa masyarakat mendukung individu LGBT?
67 jawaban



Gambar 2 tentang dukungan terhadap komunitas LGBT oleh responden

Hasil survei ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pengetahuan tentang LGBT di kalangan anak muda, sikap penolakan dan ketidaknyamanan terhadap komunitas ini masih sangat tinggi. Banyak responden yang merasa bahwa keberadaan komunitas LGBT bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang mereka yakini. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sikap terhadap isu LGBT di Indonesia masih memerlukan waktu yang panjang dan pendekatan yang lebih inklusif dalam hal pendidikan serta sosialisasi mengenai keberagaman gender dan orientasi seksual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Prof. Tundjung berpendapat bahwa ia tidak menyetujui adanya legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia. Menurutnya, penolakan ini didasarkan pada kenyataan bahwa saat ini tidak ada peraturan atau undang-undang yang secara eksplisit mengatur atau mendukung legalitas perkawinan sesama jenis. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum di Indonesia belum siap untuk mengakomodasi perubahan besar dalam konteks pernikahan yang menyimpang dari norma konvensional yang telah lama dipegang teguh oleh masyarakat. Meskipun demikian, Prof. Tundjung menegaskan bahwa komunitas LGBT sebagai bagian dari masyarakat tetap berhak mendapatkan hak-hak pribadinya yang mendasar, seperti hak untuk bebas dari kekerasan, hak atas privasi, dan hak atas perlindungan dari diskriminasi.

Pandangan ini menyoroti perdebatan yang lebih luas mengenai legalisasi perkawinan sesama jenis di Indonesia, yang tidak hanya melibatkan masalah hukum, tetapi juga kompleksitas sosial, budaya, dan agama. Pendukung legalisasi menekankan pentingnya pengakuan terhadap kesetaraan hak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa setiap individu, terlepas dari orientasi seksual atau identitas gendernya, berhak untuk mencintai dan membangun keluarga tanpa diskriminasi. Legalisasi ini, menurut mereka, adalah langkah penting untuk menghapus ketidakadilan

struktural dan memastikan bahwa komunitas LGBT memperoleh martabat serta hak-hak sipil yang sama seperti warga negara lainnya.

Di sisi lain, kelompok penentang legalisasi perkawinan sesama jenis menegaskan kekhawatiran mereka terhadap dampak yang mungkin terjadi jika norma tradisional dan prinsip keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia diubah secara signifikan. Bagi mereka, legalisasi ini tidak hanya dianggap bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga berpotensi merusak fondasi nilai-nilai sosial yang telah membentuk struktur keluarga tradisional di Indonesia. Kekhawatiran utama muncul pada kemungkinan terganggunya perkembangan generasi muda dan identitas budaya bangsa, yang bisa mengarah pada kebingungan identitas serta pergeseran nilai moral dalam jangka panjang.

Kompleksitas perdebatan ini menunjukkan bahwa isu legalisasi perkawinan sesama jenis tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan sederhana. Di dalam konteks Indonesia yang plural dan majemuk, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan keberagaman pandangan masyarakat serta norma-norma yang ada. Meskipun terdapat suara-suara yang lebih terbuka terhadap isu hak asasi manusia, resistensi dari kelompok konservatif dan keagamaan masih sangat kuat. Oleh karena itu, jalan menuju legalisasi perkawinan sesama jenis masih sangat panjang dan memerlukan pertimbangan yang matang.

Untuk menciptakan solusi yang inklusif, pendekatan yang hati-hati sangat diperlukan, dengan melibatkan dialog terbuka dari berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemuka agama, aktivis hak asasi manusia, akademisi, serta masyarakat umum. Dialog ini perlu difokuskan untuk mencapai kesepakatan mengenai bagaimana menghormati hak-hak sipil tanpa melanggar norma-norma yang telah lama dijaga. Hanya melalui pendekatan yang demikian, perubahan sosial yang signifikan dapat tercapai tanpa menimbulkan perpecahan yang lebih dalam di tengah masyarakat yang beragam. Selain itu, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dampak perubahan kebijakan terhadap stabilitas sosial dan kesatuan bangsa. Isu legalisasi perkawinan sesama jenis seharusnya dipandang sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun masyarakat yang adil dan inklusif, di mana hak asasi setiap individu dihormati tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental yang dijunjung tinggi oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini, pengembangan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip penghormatan terhadap hak-hak sipil, serta mempertahankan harmoni sosial menjadi sangat penting agar Indonesia dapat menavigasi isu-isu sensitif ini dengan cara yang bijaksana dan berkeadilan.

Prof. Tundjung menegaskan bahwa meskipun legalisasi perkawinan sesama jenis saat ini tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat, hal

tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menolak hak-hak pribadi yang sah dari komunitas LGBT. Pengakuan terhadap hak-hak dasar ini, seperti hak untuk bebas dari kekerasan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, harus tetap dijaga agar setiap individu, tanpa memandang orientasi seksual, dapat hidup dengan aman dan bermartabat di tengah masyarakat. Perdebatan ini bukan hanya mengenai pengakuan hukum atas perkawinan, tetapi juga mengenai bagaimana masyarakat Indonesia dapat menemukan keseimbangan antara menghormati hak-hak sipil individu dan menjaga stabilitas serta nilai-nilai sosial yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- Human Rights Watch. (2016). *“These Political Games Ruin Our Lives”*: *Indonesia’s LGBT Community Under Threat*.
- Yulius, Hendri. (2018). *Coming Out: Indonesia’s Gay Community*.
- Mas'udi, Wawan, & Hamdi, Fauzi. (2017). *Islam and LGBT Discourse in Indonesia: Attitudes, Strategies, and Implications*.
- Pew Research Center. (2013). *Global Divide on Homosexuality: Greater Acceptance in More Secular and Affluent Countries*.
- Yusuf, Hendra. (2020). *Hak Asasi Manusia dan Perlindungan terhadap Komunitas LGBT di Indonesia: Tinjauan Yuridis*.